

MAKNA MOGOK KERJA BAGI BURUH (Studi Kasus Makna Mogok Kerja bagi Buruh di Surabaya Tahun 1996)

Aloysius Jondar

Pascasarjana Universitas Teknologi Surabaya

E-mail: aloyusciendana@gmail.com

Abstract

Since the days of the Old Order government, the New Order, Reform phenomenon demonstration of workers in Indonesia were never resolved. Proven to date issues of the demonstration is still running. Even in the era of reform frequency of demonstrations of the workers became more transparent because in line with the government's attitude would listen and convey the aspirations of workers. In connection with this phenomenon, the study of the phenomenon of workers become increasingly keranjang for writers. But the study of labor problems only limit themselves to study the phenomenon of demonstrations of workers in 1996. In line with the phenomenon that have been raised, then that becomes the problem to find out in this study, whether the demonstrations by workers in 1996 in Surabaya carry meaning for the workers themselves. Results showed that the phenomenon of workers in Surabaya brings meaning to the workers themselves. Meaning of demonstrations for workers in Surabaya, their awareness and responsibility of the employer, the weakness of the management and policies of the company, the claim by the minimum wage and a living wage, improvement allowances and clarity retirement, intervention workers when they do strike, their weaknesses SPSI and the role of government policy weaknesses.

Keywords: demonstrations, workers

PENDAHULUAN

Yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian makna demonstrasi atau mogok kerja bagi buruh di Surabaya yaitu *pertama*, fenomena penyimpangan pemberian upah bagi kaum buruh yang tidak konsisten antara standar upah minimum dengan kenyataan di lapangan. Apalagi kalau dibandingkan upah minimum yang diterima buruh masih di bawah rata-rata dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) buruh dengan istri dan 3 anak (Surabaya Post, 5 Oktober 1995, "Ratusan Perusahaan masih melanggar UMR", Jawa Pos, 18 Mei 1995, "Karyawan Maska terima penangguhan UMR"). Hasil pengumpulan data LBH Surabaya di tahun 1995 menunjukkan bahwa 31% atau 91 perusahaan yang diteliti total pembayaran upahnya di bawah Rp. 3.000,- atau di bawah ketentuan UMR tahun sebelumnya. Sedangkan 21% atau 62 perusahaan, total pembayaran upahnya antara Rp. 3.000,- dan Rp.3.650,-,

sehingga yang sifatnya melanggar ketentuan UMR adalah sebesar 52% atau 153 perusahaan, dari 300 perusahaan yang diamati. Selama proses penelitian masih ditemukan empat perusahaan yang mengupah buruhnya sebesar Rp.2.000,- (Divisi Perburuhan, 1995: 5-15). Akibat pemberian upah yang tidak adil buruh melakukan pemogokan tidak masuk kerja sebagai suatu bentuk protes kepada majikannya. Peningkatan pemogokan buruh dari tahun ketahun menunjukkan rawannya masalah buruh di Indonesia (Kompas 5/5-1994, "Pemogokan dan Politik Kontrol Buruh"). Secara regional terjadi pemogokan buruh seperti yang terjadi selama tahun 1995 sampai akhir Desember 1995 di Jatim telah terjadi 121 kasus pemogokan, dimana 46% diantaranya berupa tuntutan kenaikan upah. Namun demikian dari aksi mogok yang terjadi masih terdapat beberapa aksi yang menuntut ketentuan upah minimum tahun 1994, bahkan ketentuan upah minimum tahun 1993. Hal

tersebut sangat mencerminkan bagaimana lemahnya ketentuan upah, serta bagaimana lemahnya posisi perlindungan hukum (Divisi Perburuhan, 1995:4).

Fenomena *kedua*, karena pihak kapital (majikan) terlalu banyak mengambil keuntungan dari perusahaannya, sehingga memperketat pemberian gaji bagi buruhnya. Kapital terlalu banyak mengambil keuntungan dari produk perusahaannya buat kepentingan pribadi maupun pungutan liar dari pihak lain seperti penguasa. Sejalan dengan realita ini, maka Latief berjanji akan melakukan pemangkasan terhadap pungutan liar dari penguasa (pemerintah) yang diberikan kepada pengusaha, sehingga memberatkan pembiayaan produksi dan pengurangan upah minimum bagi buruh. Hasil pengamatannya selama ini, rata-rata biaya tenaga kerja (*labour cost*) sebesar 10 persen untuk sektor industri dari seluruh total biaya produksi. Padahal produktivitas tenaga kerja untuk sektor industri mengalami kenaikan 4 kali lipat. Dan total produksi ada yang berpendapat sekitar 5-30 % biaya non produksi atau pungutan dari biaya total produksi (Surya, 3/2-1996, "Sebelum Depnaker mengimbau instansi lain Latif pangkas 16 pungutan").

Fenomena *ketiga*, kehidupan buruh di perkotaan juga mengakibatkan pergeseran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kota. Pergeseran yang terjadi dalam masyarakat kota: (1) wilayah Rungkut yang dulunya hanya sebagai tempat pemukiman kini berubah menjadi suatu wilayah kawasan industri Rungkut; (2). Pergeseran industri ini menimbulkan imbas pergeseran pemukiman; (3). Pergeseran industrial yang menimbulkan pergeseran pemukiman merupakan struktur sosial yang bermula dari adanya proses invasi dan suksesi; (4). Struktur sosial masyarakat pinggiran kota yang berubah dalam proses urbanisasi juga berbentuk proses migrasi labors; (5). Struktur sosial masyarakat tepian kota yang berubah dalam proses urbanisasi

lebih kuat imbas pergeseran industrial daripada pergeseran sosial; (6). Perpindahan penduduk lebih banyak berasal dari pusat kota ke pinggiran kota, daripada yang berasal dari desa ke kota (Siahaan 1985: 54-55).

Fenomena *keempat*, pergeseran struktur pekerjaan dalam masyarakat kota. Struktur pekerjaan yang berubah diantaranya pergeseran dari pekerjaan manual ke pekerjaan administerei (*clerical*), pengawasan (*supervisory*) dan manajerial, yang menghasilkan peningkatan umum dalam status ekonomi dan tingkat sosial. Kemudian sektor industri bergeser dari industri primer (ekstraktif dan pertanian) ke industri sekunder (manufaktur) ke produksi tersier (jasa), yang diikuti oleh urbanisasi, yaitu orang terkumpul di kota-kota. Selain itu, organisasi sosial menjadi lebih kompleks, dan akan tercermin dalam organisasi spatial yang lebih kompleks dan berbeda (Butler 1978: 125-146) Bentuk perilaku lain yang tidak adil dari pihak kapital terhadap buruh adanya tuduhan yang tidak manusiawi dari majikan kepada buruh wanita. Seorang buruh wanita yang dituntut oleh majikan agar mengembalikan semua utang dan mempertanggungjawabkan semua utang dari rekan-rekan kerja baru mendapatkan ijin pulang kampung. Padahal awalnya wanita yang masih tergolong kekanakan tidak mengerti soal negosiasi pembayaran uang muka untuk masuk kerja di sebuah perusahaan batik di Kudus. Tapi tiba-tiba saja ia dituntut mengembalikan utangnya. Padahal dia masuk ke situ hanya mengikuti ibunya dan di bawah oleh majikan bersama temannya dari Lasem (Angelino, 1993:101-111). Banyaknya ragam fenomena perburuhan dari hasil penelitian yang diungkapkan secara tidak langsung juga semakin mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan materi yang sama tetapi cara pandang yang berbeda. Dengan penelitian yang sering dilakukan ini penulis meneliti kembali masalah buruh dengan memfokuskan perhatian pada makna sosial demonstrasi bagi

buruh harian tidak tetap di Surabaya. Bertolak dari pandangan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan pokok yang harus terjawab dalam penelitian ini, yaitu Apakah makna demonstrasi atau mogok kerja bagi buruh di Rungkut, Surabaya? Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Kondisi obyektif yang muncul selama ini pihak ilmuwan sosial kurang begitu berperan dalam mengangkat permasalahan yang muncul bagi pihak yang lemah dalam kehidupan bermasyarakat khususnya buruh. Yang banyak terlibat langsung untuk mengangkat hak dan martabat kehidupan buruh selama ini adalah pihak pengusaha atau borjuis dan negara (state) atau pemerintah. Tetapi kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Justru penindasan dalam arti hak-hak mereka tidak dilayani secara serius. Karena itulah, sangat perlu ada peran dari pihak lain khususnya ilmuwan sosial untuk mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Peran yang diharapkan dari ilmuwan sosial mereka dapat mensosialisasikan ritme kehidupan buruh dari hasil kondisi obyektif di lapangan. Bukan hanya mensosialisasikan konsep-konsep yang hanya berasal dari teori-teori klasik tetapi bagaimana ilmuwan sosial itu mensosialisasikan kehidupan nyata yang dialami buruh. Dengan demikian studi yang dilakukan membawa input bagi ilmuwan sosial untuk dijadikan acuan dalam menyusun alternatif teori baru yang sesuai dengan kondisi obyektif kehidupan buruh di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada masalah makna mogok kerja bagi buruh di Rungkut, Surabaya pada 1996. Difokuskan pada 1996, karena pada masa-masa tersebut lagi puncaknya demonstrasi dan reformasi para buruh di Indonesia. Dengan demikian, makna demonstrasi bagi buruh industri yang ada sekarang bagi penulis sudah tidak menjadi fokus kajian.

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan dalam bentuk materi (fisik) dan dokumen. Untuk mendapatkan data primer, dapat diketahui lewat observasi dan wawancara mendalam serta diskusi kelompok yang terfokus dengan buruh di Rungkut- Surabaya. Pendekatan observasi dan wawancara serta studi melalui diskusi kelompok yang terfokus perlu dipergunakan dalam penelitian ini agar pengumpulan datanya lebih fleksibel dan mendalam serta dapat disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Bentuk observasi yang dilakukan semi observasi partisipan.

Dalam melakukan observasi partisipan ini data dikumpulkan langsung dari hasil pengamatan dan peninjauan dalam ritme atau fenomena kehidupan harian buruh di lokasi penelitian. Dalam hal ini setiap gerak-gerik buruh dan aktivitas lain di lokasi dicatat untuk dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam observasi ini peneliti termasuk bagian dari keadaan alamiah tempat berlangsungnya observasi (Black, 1992: 289). Dalam observasi peneliti melakukan pendekatan terhadap buruh di saat waktu luang dari buruh di tempat tinggalnya (Spradley, 1980:60-62). Dan selama kurang lebih empat bulan melakukan penelitian peneliti hidup bersama buruh pada waktu sore hari hingga malam ketika mereka sudah kembali dari tempat kerjanya masing-masing dalam jangka waktu empat bulan. Penulis memilih waktu sore hari dan malam hari karena pada kesempatan tersebut buruh sudah berada di pondokan semuanya. Dan selama beberapa hari peneliti akan tinggal bersama mereka (*indekost*) untuk menggali informasi yang lebih mendalam serta dapat mengetahui dan memahami ritme kehidupan harian buruh. Menurut pandangan penulis, penelitian ini lebih mudah menggali informasi dari fenomena kehidupan buruh di tempat *indekost*

ketimbang di tempat kerjanya. Dalam hal ini peneliti memiliki asas kepercayaan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di tempat kerjanya. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview atau wawancara mendalam (*in_depth interview*) dengan subyek penelitian dengan menggunakan bahan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan lain yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi adalah menggunakan pendekatan diskusi kelompok yang terfokus dan kita mengadakan diskusi bersama secara terstruktur. Untuk memudahkan penggalian informasi dan memudahkan kelancaran diskusi, maka peneliti membatasi peserta diskusi sebanyak 2-5 orang peserta untuk diajak berdiskusi di tempat kos mereka. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok tidak selalu orang yang sama tetapi bisa dilaksanakan secara bergantian. Tujuan diskusi kelompok dilakukan untuk membantu peneliti dalam merekam atau menyerap informasi sebanyak-banyaknya dari buruh harian tidak tetap di Rungkut. Pendekatan lain yang juga dilakukan peneliti menggunakan teknik *key person* untuk dijadikan sumber informasi pertama. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai data awal. Pada kesempatan wawancara ia diminta menunjuk orang lain yang dianggap membantu melengkapi data yang diperlukan. Selanjutnya, peneliti meminta informasi dari responden yang telah dihubungi untuk menunjuk yang lain hingga kesannya informasi yang berantai. Yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Dan ukuran untuk menguji kebenaran data juga peneliti sendiri. Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya unsur obyektivitas dan subyektivitas dalam penelitian sebab yang mengukur dan menguji kebenaran datanya dilakukan sendiri.

PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam akan dipergunakan peneliti untuk dideskripsikan dan diolah. Data ini akan mulai diolah dengan cara bertahap mengklasifikasikan data dan menyeleksi data yang diperlukan (Spradley, 1980:105-121). Dalam menganalisis data penulis tidak menggunakan model uji statistik tetapi hanya dilakukan analisis data melalui *interpretative understanding*. Peneliti melakukan *interpretative understanding* dengan tujuan melakukan penafsiran terhadap semua data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Atkinson, Hammersley, dalam Denzin dan Lincoln, 1994:248-258). Model analisis yang dikembangkan untuk mendapatkan makna sosial dari kehidupan buruh ini dengan mengembangkan analisis melalui bentuk pertanyaan, siapa (*who*) yang menyampaikan pengalaman hidupnya sebagai buruh, apa (*what*) masalah yang ditemukan buruh dari pengalaman hidup hariannya, apa kegiatannya setiap hari, apa ada kata kunci (*keywords*) yang menunjukkan makna dari ritme kehidupan hariannya. Bentuk analisis ini dari hasil cerita yang disampaikan buruh kepada peneliti. Dan kata-kata kunci yang ditemukan lewat cerita yang disampaikan buruh dianalisis untuk memberikan makna teoritis. Dengan demikian pendekatan analisis yang dipergunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan *keywords* (kata kunci) untuk mendapatkan makna yang terselubung dari kehidupan buruh. Sebagai contoh kata kunci, "buruh", buruh pancasila", "perburuhan", memiliki makna yang menunjukkan adanya alienasi buruh dengan majikan dan lingkungan sekitarnya. Data yang telah dikumpulkan ini diharapkan tidak hanya menampilkan secara mentahan tetapi semua data yang dianalisis diberikan makna sosial dan cultural meaning (Spradley, 1980: 85-95 bdk. juga William, 1976: 15-16). Selain itu, diberikan makna yang bersifat teoritik sesuai

prinsip penelitian kualitatif yang tidak cuma berhenti pada pemaparan data mentah belaka (Wignjosobroto, 1994: 3). Fenomena yang menarik dari penelitian ini bahwa perusahaan yang diteliti lewat para buruh ini semuanya pernah melakukan mogok kerja untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Misalnya, Kedaung yang dulu terkenal baik dan tidak pernah melakukan unjuk rasa bagi buruhnya selama tahun 1996 ini terpaksa buruhnya melakukan mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran secara spontanitas. Sedangkan pabrik roti dari dulu memang sudah terkenal dengan kegiatan demonstrasi yang dilakukan buruh. Demikian juga pabrik rokok mengalami hal yang sama. Hanya tentu motifnya yang berbeda tapi pada intinya memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Dari kegiatan mogok kerja yang dilakukan buruh ini pada umumnya memiliki simbol makna yang sangat luas sekali. Sebutan mogok kerja, unjuk rasa, di lingkungan buruh dalam pandangan mereka langsung tertuju pada usulan kenaikan upah, tunjangan kesejahteraan, tunjangan dana hari tua. Di mata mereka mogok kerja itu sebagai simbol makna perbaikan kehidupan ekonomi buruh setiap hari. Jadi kalau menyebut mogok kerja mereka sudah berpikir kenaikan upah dsbnnya. Rincian lengkapnya terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel makna mogok kerja

No.	Jenis simbol/makna mogok kerja
1	Kesadaran dan tanggung jawab majikan yang kurang
2	Kelemahan manajemen dan kebijakan perusahaan
3	Perbaikan tunjangan dan kejelasan dana hari tua/pensiun
4	Tuntuan UMR dan upah layak
5	Dicing/Ditakut-takuti
6	Ditunggangi/Diintervensi
7	Kelemahan peran SPSI
8	Kelemahan kebijakan pemerintah

Makna lain dari keadaan mogok kerja ini membawa makna kesadaran dan tanggung jawab majikan yang masih kurang terhadap kehadiran para buruh. Mereka mengharapkan pihak majikan memiliki hati nurani untuk menerima tuntutan mereka secara bijaksana dan adil. Dalam pandangan mereka, supaya hati nurani majikan terbuka terhadap buruh yaitu dengan cara mogok kerja. Selain itu, dengan adanya mogok kerja mereka mengharapkan pihak majikan menciptakan suasana kerja yang harmonis dalam perusahaan seperti tanggungjawab pembayaran yang adil atau layak sesuai dengan jerih payah yang mereka peroleh. Dengan mogok kerja, diharapkan membawa kesadaran bagi pengusaha dalam memperbaiki pemberian upah atau gaji, lembur, tunjangan hari raya, jam lembur. Kelemahan manajemen dan kebijakan perusahaan. Bagi buruh kegiatan mogok kerja ini dapat membawa makna kelemahan manajemen dan kebijakan perusahaan. Mereka mengharapkan agar kebijakan perusahaan dalam menempati posisi karyawan agar sesuai dengan keinginan mereka. Dalam arti posisi karyawan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik supaya diganti. Misalnya, protes terhadap pergantian direktur, pengawas, kepala personalia. Menurut mereka, demonstrasi itu pokok permasalahannya pada perusahaan itu sendiri. Mungkin karena sudah merupakan persepsi karena adanya suatu ketidakterbukaan antara pengusaha dengan buruh soal penetapan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang dikenal dengan sebutan asuransi masa pensiun hari tua. Dalam persepsi buruh, dari aturan yang mereka baca bahwa bahwa pihak perusahaan dan buruh itu sama-sama dikenakan pembayaran karena ini menyangkut masalah pribadi karyawan, sedangkan perusahaan itu hanya membantu karena perusahaan tidak memakai aturan asuransi itu. Akibatnya, muncul persepsi yang salah di mata buruh yaitu

sudah gaji rendah masih dipotong lagi dengan pensiun. Perpepsi-persepsi begini menunjukkan bahwa pengelola belum siap terutama soal aturan yang belum dimengerti oleh perusahaan bagian personalia. Karena itu, mereka mengharapkan bagian personalia harus banyak belajar supaya bisa mengetahui tentang dana pensiun sebelum diinformasikan kepada buruh. Perbaikan tunjangan dan kejelasan dana pensiun. Makna lainnya, adanya simbol perbaikan tunjangan dana pensiun. Tuntutan mereka agar pelaksanaan dana pensiun jangan bersifat paksaan tetapi berdasarkan suka rela atau kemauannya. Kalau dipaksakan hal ini menunjukkan mereka kurang terlalu memikirkan soal dana pensiun. Sebab mereka masih berurusan dengan kebutuhan akan makanan sekarang. Terlalu jauh kalau mereka urus negosiasi soal dana pensiun sementara kebutuhan mendesak saat ini untuk makan sangat mereka perlukan. Saat itu, mereka juga meminta kejelasan soal ahli waris yang menerima dana tunjangan hari tua mereka kalau mereka sudah tidak ada lagi. Karyawan hanya meminta kejelasan apakah ahli warisnya ada pada anaknya atau tidak. Mereka juga menolak istilah dana pensiun. Sebab sebutan tersebut, untuk buruh itu kurang tepat. Yang relevan dalam pandangan buruh yaitu tunjangan hari tua. Sebab dalam pandangan buruh, dana pensiun hanya ada di lingkungan pemerintah yang membayar melalui kantor bendahara negara khusus yang pegawai negeri sipil. Kalau pekerja swasta sebaiknya disebutkan sebagai tunjangan hari tua. Tuntutan UMR dan upah yang layak. Melakukan kegiatan mogok kerja ketika proses produksi berlangsung merupakan salah satu bentuk simbol aktualisasi diri dalam melakukan tuntutan atau melakukan protes untuk memperbaiki pendapatan setiap hari. Parahnya kalau mereka tidak protes berarti tidak ada kenaikan upah. Dengan demikian, mogok kerja itu bisa dijadikan sebagai simbol peningkatan pendapatan mereka. Sebab

dengan mogok kerja pihak perusahaan akan memperhitungkan semua keinginan buruh untuk menaikkan gaji. Mereka sudah sempat mengajukan menaikkan upah sebelum demonstrasi berlangsung tetapi tidak disetujui oleh perusahaan hingga terpaksa mereka melakukan demonstrasi. Motivasi di pabrik roti mereka melakukan mogok kerja antara lain masalah pelecehan diantara mandor dan sesama buruh dalam melakukan pekerjaan. Mereka menginginkan agar mandor yang pernah melakukan pelecehan terhadap rekan kerja mereka dikeluarkan dan terbukti tuntutan mereka itu dikabulkan setelah mereka melakukan unjuk rasa. Tuntutan kenaikan upah di Kedaung bukan saja pada masalah UMR tetapi menyangkut uang tranpor, uang makan, masalah lain-lain termasuk pemotongan iuran dana pensiun yang dipaksakan. Kalau buruh tidak dipaksakan tanda tangan formulir yang disiapkan sebenarnya tidak terjadi demonstrasi atau mogok kerja. Karena dipaksakan dan tidak ada penjelasan tambahan mau tak mau mereka melakukan demonstrasi. Mereka merasa tertekan dan paksa ikut tanda tangan yang membuat mereka menjadi semakin emosi. Pelaksanaan mogok kerja di Kedaung, pabrik roti, pabrik rokok, prinsip umumnya sama-sama memiliki makna tuntutan kenaikan gaji yang kurang selama ini. Yang menariknya jumlah karyawan yang berjumlah ribuan itu unjuk rasanya dilakukan terarah, sama-sama berteriak melakukan perusakan terhadap fasilitas perusahaan seperti mobil, rokok dan sebagainya meskipun tidak ada teriakan yang terlalu berlebihan dalam arti yang sifatnya membabi buta. Demonstrasi yang terarah ini dilengkapi dengan tulisan bernada sindiran di spanduk yang intinya hapuskan dana pensiunan. Kendati demonstrasi sedikit dipaksakan karena keadaan tetapi ditemukan perubahan atau perbaikan tuntutan mereka setelah mereka bekerja. Diantaranya, uang tranpor dinaikan uang makan dinaikan, uang pokok setiap tahun dinaikan. Meskipun ada

kenaikan masih ditemukan sikap yang tidak puas dari karyawan lama karena upah 30 hari kerja itu. Dari pemerintah untuk karyawan lama itu ada. Karyawan baru berlaku. *Dicing* dalam arti buruh ditakuti-takuti Persoalan yang unik di Kedaung dan sangat dirasakan akibatnya oleh karyawan disana adanya istilah dicing. Sistem dicing terhadap karyawan ini khusus terhadap mereka yang gencar-gencar melakukan demonstrasi. Bahkan segala gerik-gerik mereka, tingkah laku mereka diperhatikan semua. Kalau ada karyawan yang merasa dicurigai melakukan kegiatan yang diluar dari kebiasaan yang dibuatnya akan dipindahkan ke bagian yang paling sulit dikerjakan. Misalnya, dipindahkan ke bagian tukang sampah. Kegiatan dicing oleh pihak perusahaan ini diperhatikan sampai pada tingkat pergaulan mereka setiap hari di tempat kerja. Bahkan orang yang bergaul terlalu akrab dengan sesama temanpun dicing. Misalnya, regu yang terlalu akrab atau kompak dalam menjalankan pekerjaan juga dicing. Apalagi Kepala Regu yang terlalu akrab dengan anak buahnya juga dicing semuanya. Maunya perusahaan kalau kerja itu tidak boleh omong-omong. Harus tahu bagiannya masing-masing. Yang kerja di bagian mesin khusus mengerjakan bagian mesin, demikian mereka yang bekerja dibagian dicing mengerjakan bagian diping. Yang boleh dilakukan selama jam istirahat yaitu rokok, makan harus tepat pada waktunya. Kalau ketahuan sama pengawas melakukan kegiatan rokok pada saat kerja, maka bagian keamanan (Satpam) langsung membawa keluar bagi yang melanggarnya. Hanya kalau rokok di kantin tidak menjadi persoalan karena disitu memang diusulkan. Tetapi, kalau sampai ketahuan pihak perusahaan atau ketangkap basah tiada maaf bagi buruh karena langsung dikeluarkan saja. Untuk masalah tidak masuk kerja bagi mereka tidak terlalu menjadi persoalan karena teman bisa buat absenkan dan sanksinya hanya diberi peringatan. Kegiatan

dicing terhadap karyawan yang melakukan kegiatan yang dicurigai ini ternyata tidak hanya di Kedaung tetapi juga di perusahaan lainya di sekitar Rungkut. Sebagai contoh katanya, empat orang anak yang ikut demonstrasi waktu itu disuruh mewakili SPSI menghadap Depnaker untuk menceritakan persoalan yang sebenarnya waktu demonstrasi. Setelah mereka pulang akhirnya dicing juga. Petugas mencari-cari kesalahannya. Setelah kesalahannya diketahui kemudian dikeluarkan atau di-PHK. Setelah kasus ini, rekan-rekan buruh tidak berani lagi ikut demonstrasi. Meskipun-anak memiliki niat baik untuk meningkatkan upah tetapi malah diperlakukan demikian. Padahal tugas mereka cukup berat mewakili teman dan berjuang buat kesejahteraan pabrik roti yang kini jumlahnya kurang lebih 3.000 orang. Ditanggunggi sama dengan mengkambing-hitamkan buruh. Yang unik dari kegiatan demonstrasi di Kedaung ini adanya isu demonstrasi yang ditanggunggi oleh pihak luar. Dengan demikian mogok kerja yang dilakukan tidak murni dijalankan oleh buruh seperti keluhan yang disampaikan rekan-rekan yang bekerja di Kedaung. Dari satu sisi mogok kerja ini membawa makna bagi buruh tetapi disisi lain ada pihak tertentu yang menanggunggi pelaksanaan demonstrasi seperti yang mereka sampaikan ketika peneliti melakukan investigasi. Keluhan ini mereka kemukakan secara terang-terangan saat melakukan diskusi dalam kelompok kecil sebanyak empat orang. Unjuk rasa itu ditanggunggi dari luar bukan tanpa apa ada buktinya. Sejak pertama unjuk rasa berlangsung karyawan di beberapa perusahaan seperti di Kedaung semakin lama semakin menghilang. Yang bertahan di sekitar halaman pabrik adalah pihak luar yang nota bene bukan buruh di pabrik. Kemudian juga, bagian yang membuat rusak menurut pengakuan mereka bukan orang dalam (karyawan) melainkan juga orang luar. Persoalannya gara-gara anak luar itu dipukul sama pihak kepolisian (brimob) hingga massa

tambah mengamuk. Dengan demikian suasana kekacauan bertambah. Seandainya pihak keamanan tidak pukul lebih dulu masa tidak akan membalasnya. Kendati ada pihak luar yang memanfaatkan kesempatan ini dengan cara ikut ramai-ramai berdemonstrasi tetapi unsur keinginan pribadi buruh juga tetap ada. Mereka mengakui demonstrasi memang menyalahi aturan tapi ada unsur emosional dari diri sendiri. Masalahnya kita sudah menahan diri dalam penderitaan terlalu lama. Minta kesabaran terhadap diri dalam penderitaan lama kelamaan sulit bertahan hingga sampai pada puncaknya memutuskan untuk berontak atau melawan. Karena sifat demonstrasi itu menyeluruh kata ditunggangi kurang cocok dalam pandangan mereka. Karena itu, merupakan ungkapan ketidakpuasan buruh industri itu sendiri. Mungkin kata ditunggangi itu merupakan senjata bagi perusahaan atau pemerintah untuk mempersalahkan atau mengkambinghitamkan para buruh. Contohnya, masalah demonstrasi di perusahaan roti tidak ditunggangi tapi merupakan suatu strategi dari perusahaan, karena dengan adanya UMR yang telah ditentukan oleh pemerintah, perusahaan berpikir mungkin tak mampu membayar, dibiarkan berlarut-larut sehingga timbul gejolak dan demonstrasi. Jadi demonstrasi tak mungkin ada tanpa ada yang mengkoordinir. Maka dengan adanya demonstrasi, pemerintah akan memanggil perusahaan tersebut untuk mempertanggungjawabkannya. Jika seandainya di perusahaan memberikan argumen bahwa dia tidak mampu untuk memberikan upah yang ditentukan oleh pemerintah tersebut kepada karyawannya setelah mereka mengkalkulasikan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan baik fixed cost maupun yang variabel cost (harga pokoknya), sehingga pihak perusahaan perlu mengadakan pengurangan karyawan dengan melakukan kebijaksanaan PHK (putus hubungan kerja). Lemahnya peran SPSI. Hal lain, kegiatan mogok kerja ini membawa simbol

lemahnya peran SPSI dan pemerintah dalam membela kepentingan buruh. Dari realita yang diperoleh buruh bukan pembelaan yang mereka terima dari SPSI dan pemerintah tetapi mengambang pemecahan masalah mogok kerja yang dilakukan SPSI dan pemerintah. Tuntutan lain dari demonstrasi di pabrik rokok itu antara lain, mempunyai makna perubahan pengurus SPSI. Misalnya, tuntutan minta ketua SPSI diganti dan kepala personalia diganti. Inti tuntutan, meminta ganti ketua SPSI yang pada dasarnya beralasan bahwa garapannya sama tapi gajinya tidak sama. Justru di sini peran yang ditampilkan oleh ketua SPSI, tapi pada kenyataannya SPSI tidak berperan. Tidak ada respon terhadap kenyataan yang dihadapi. Mereka juga mengakui, melakukan demonstrasi karena ada yang ditunggangi. Tetapi mereka juga menyadari meskipun ada pihak lain yang ikut campur mereka lakukan itu berdasarkan kata hati mereka masing-masing. Mereka lakukan itu didasari atas faktor kesadaran antar pihak buruh dari masing-masing unit. Sebelum melakukan mogok mereka melakukan negosiasi diantara mereka atau koordinir dengan teman-teman di masing-masing unit. Setelah ada kesepakatan baru mereka lakukan. Setiap perusahaan menurut hasil penelitian memiliki tenaga SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). SPSI yang merupakan perpanjangan tangan mereka untuk mengajukan aspirasi mereka kepada perusahaan tidak merasakan manfaat bagi mereka. Bahkan ada yang tidak kenai dengan lembaga SPSI. Mereka hanya bisa mengenal SPSI kalau ada potongan iuran bulanan. Sebab setiap bulan upah para buruh dipotong buat iuran bulanan kepentingan SPSI. Yang ideal dari kehadiran SPSI di berbagai perusahaan itu bisa memperjuangkan kepentingan buruh. Bukan malah melindungi kepentingan perusahaan. Selama ini yang terjadinya itu, SPSI lebih banyak berlandung di belakang perusahaan.

Kehadiran Negara. Makna kehadiran negara atau pemerintah di mata buruh memiliki makna yang bervariasi. Ada yang mengatakan pemberian izin kepada perusahaan untuk membuka usahanya sebebaskan-bebasnya secara tidak langsung menunjukkan partisipasinya memberikan lapangan pekerjaan buat buruh. Meskipun mereka menemukan kehadiran negara demikian, mereka berpendapat makna kehadiran negara itu merugikan buruh. Misalnya, penentuan upah secara penuh dari pemerintah itu sudah menunjukkan pemiskinan terhadap kehidupan mereka setiap hari. Pasalnya, mereka tidak diajak dalam menentukan upah setiap hari. Yang mereka terima hasil jadinya. Bahkan kalau mereka melakukan protes atas kebijakan yang disampaikan buruh, pihak pemerintah malah ikut mendukung pihak perusahaan. Contohnya, pemanggilan buruh yang aktif demonstrasi itu sudah melambangkan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan. Kemudian, memasukkan bagian keamanan ketika mogok kerja berlangsung dan ketika berunding dengan perusahaan secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan. Intervensi pemerintah terhadap konflik kehidupan buruh ini sudah menunjukkan adanya penyalagunaan kekuasaan (hegemoni) dari penguasa negara (pemerintah) terhadap pencabutan hak dan kewajiban buruh serta pengontrolan kehidupan sosial kaum buruh. Hal lain, adanya makna peredam konflik. Kehadiran pemerintah lewat aparat keamanan pada saat mereka melakukan mogok kerja merupakan suatu indikasi adanya perhatian pemerintah untuk meredam konflik. Kemudian memasukkan tenaga intel dari keamanan saat mereka menjalankan pekerjaan sesuai demonstrasi merupakan suatu indikasi adanya peredam konflik dari pemerintah. Kemudian buruh mendapatkan makna simbol pembela bagi pengusaha. Tidak adanya sikap yang tegas dari pemerintah terhadap perusahaan yang melanggar aturan UMR juga

suatu indikasi pemerintah lebih banyak membela pengusaha ketimbang kepentingan buruh. Disamping itu, membawa makna intervensi terhadap kepentingan buruh. Tidak adanya negosiasi antara buruh dan majikan dalam menentukan upah dan langsung ditentukan oleh pemerintah menandakan adanya intervensi pemerintah terhadap pencabutan atau perampasan hak-hak mereka. Dari makna ini kita dapat memberikan arti bahwa buruh mendapatkan makna alienasi dari kehadiran pemerintah dalam kehidupan hariannya, buruh merasakan kehilangan makna (*meaninglessness*) dari kegiatan produksi yang dijalankan setiap hari, tidak adanya *powerlessness* bagi buruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka makna mogok kerja bagi buruh di Surabaya yaitu adanya kesadaran dan tanggung jawab majikan, adanya kelemahan manajemen dan kebijakan perusahaan, adanya tuntutan UMR dan upah layak, adanya perbaikan tunjangan dan kejelasan dana hari tua/pensiun, adanya intervensi buruh ketika mereka melakukan mogok kerja, adanya kelemahan peran SPSI dan kelemahan kebijakan pemerintah. Realita kegiatan mogok kerja yang dilakukan buruh selama ini umumnya dapat memenuhi semua tuntutan buruh. Kendati tidak semua tuntutan buruh itu dikabulkan. Tetapi paling tidak ada nilainya sedikit atau ada perbaikan sedikit ketimbang tidak ada perubahan sekali. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa tidak semua tuntutan buruh dipenuhi semuanya. Karena itu, makna mogok kerja bagi buruh itu tidak semuanya membawa perbaikan terhadap berbagai tuntutan buruh. Hanya kita harus menyadari juga ada perbaikan yang dilakukan meskipun tidak secara seratus persen dijalankan. Misalnya, tuntutan ganti mandor, ganti personalia semuanya dikabulkan. Hanya barangkali tuntutan uang lembur yang wajar

dan UMR yang belum terealisasi secara penuh. Pertentangan yang muncul dalam masyarakat industri sebagaimana yang digambarkan Marx ketika perusahaan mulai membuka maka muncul pula konflik yang terjadi antara buruh dan majikan. Konflik yang muncul dalam masyarakat industri terjadi dalam pandangan Marx karena menyangkut kepentingan ekonomi bagi kaum buruh dan pengusaha. Idealnya kalau pengusaha bertambah kaya buruh pun bertambah kaya. Tidak demikian yang terjadi dalam masyarakat industri dimana yang borjusi semakin kaya sementara kaum proletarian bertambah miskin dalam arti tidak mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya. Dengan demikian, tesisnya Dahrendorf yang antara lain mengungkapkan sindiran dimana konflik dalam masyarakat industri tidak perlu terjadi kalau kaum proletariat tidak lagi hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan dari hasil produksinya. Kalau pemenuhan kebutuhan ekonomi belum terpenuhi, maka kasus pemogokan buruh atau konflik dalam masyarakat industri tidak akan berhenti. Karena itu, Marx menganggapnya ini konflik kepentingan yang tersembunyi alias konflik kepentingan yang samar-samar karena tidak mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam pemecahan konflik. Realita yang sama dialami buruh di Rungkut dimana kegiatan mogok kerja yang mereka lakukan mendapatkan hasil yang semu karena pembayaran UMR dan dana-dana lain seperti uang tunjangan serta dana pensiunan merupakan konflik yang sudah lama yang dipikirkan buruh-buruh. Pemberian informasi yang tidak jelas dan pemberian tunjangan yang tidak jelas menunjukkan masih adanya kepentingan yang tersembunyi yang masih disimpan hati sanibari para buruh di Rungkut. Kegiatan demonstrasi yang berkepanjangan

pada beberapa perusahaan di Rungkut menunjukkan adanya konflik kepentingan yang semu yang tidak ada jalan keluar yang baik kecuali melalui *planning* yang matang. Misalnya, mogok kerja yang terjadi di pabrik roti berlangsung kurang lebih 4 hari, demikian pun di Kedaung berlangsung kurang lebih 3 hari, sedangkan di pabrik rokok berlangsung kurang lebih 3 hari juga. Dari mogok kerja ini tidak semua tuntutan buruh dipenuhi kecuali janji yang muluk-muluk. Yang mendapatkan perubahan barangkali perjanjian ikut tanda tangan formulir dana pensiunan tanpa ada unsur paksaan tetapi berdasarkan kemauan buruh. Tetapi lainnya, seperti perbaikan sistem kerja, uang lembur, UMR, belum semuanya teralisasi dengan baik. Kemudian juga peranan negara dalam mengatasi konflik antara buruh dan majikan tidak mencerminkan jalan keluar yang terbaik. Yang terjadi malah pemanggilan bagi aktivis buruh yang diduga mempengaruhi rekan-rekan buruh untuk melakukan demonstrasi. Dalam pandangan pemerintah Indonesia niat baik untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat sangat dijunjung tinggi sebagaimana program kerjanya pemerintah melakukan stabilitas pembangunan ekonomi dalam tingkat eksteren dan interen. Dalam tingkat eksteren mereka melakukan kerja sama dengan investor dan negara lain untuk menanamkan sahamnya di negeri ini membuka berbagai perusahaan asing di negeri yang kemudian bisa membawa dampak penambahan tenaga kerja. Dalam tingkat interen melakukan stabilisasi dalam pembangunan ekonomi dengan berorientasi pada pengembangan bisnis pribumi (Masoe'd, 1994: 85). Dampak dari kebijakan ini juga bisa mendatangkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Paul., Hamersley. 1994. *Ethnography and Participation Observation*, dalam Densin, Norman K, Lincoln., *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications. Inc. International Educational and Professional Publisher - Thousand Oaks - London - New Delhi.
- Black, James A., Champion Dean J. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung, Eresco.
- Butler, Edgar. 1978. *Urban Sociology A Systematic Approach Urban Sociology*. Harvar and Arrow New York, Hagerstrand, San Francisco, London.
- Crouch, Harold. 1986. *The Regularisation Of Military-Bureaucratic Regimes: The Indonesian Case, Department of Political and Social Change* - Research School of Pacific Studies Australia National University, Edisi Juli. Dekat, Angelino dalam Suparlan, Parsudi (Penyunting). 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Divisi Perburuhan. 1995. "Rangkuman Penelitian Upah Tahun 1995 di Jawa Timur" Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 12\10, 1995.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, terjemahan Kramadibrata Soeheba, Jakarta, UI- Press.
- Hasibuan, Nurimansjah. 1981. "Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri" dalam Prisma No. 5. Tahun X Mei. *Jawa pos*, 18 Mei 1995, "Karyawan Maska Terima Penangguhan UMR".
- Kleden Ignas. 1986. *Empiris dalam Perdebatan Methode, Sebuah Penjelasan Tambahan*, dalam Sastrapratedja; J. Riberu; dan Frans M. Parera (edit), *Menguak Mitos-mitos Pembangunan*. Jakarta, Gramedia.
- Latif Yudi dkk. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung, Mizan.
- Mas'oe'd, Mohtar. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mas'oe'd, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1977*. Jakarta, LP3S.
- Masduki, Teten. 1994. "Pemogokan dan Politik Kontrol Buruh", dalam *Kompas*, 5 Mei 1994. Jakarta. Nasution, Agusfidar. 1982. *Buruh Perusahaan Industri Kecil dan Menengah di Jatinegara Kaum* dalam Mulyanto Sumardi dan Hans - Dieter Evers (eds), *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta, Rajawali. Pelita, 31 Oktober 1991, "Kapitalisme Tidak Bisa Dibendung". Parker, dkk (Saduran Kartasapoetra). 1992 *Sosiologi Industri*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Parera, Frans.M. 1986. *Refleksi Atas Situasi Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia* dalam M. Sastrapratedja, J. Riberu, Frans.M. Parera, Menguak Mitos-mitos Pembangunan. Telaah Etis dan Kritis. Jakarta, Gramedia.
- Rakhmat Jalaludin. 1966. *Komunikasi dan Perubahan Politik di Indonesia*, dalam Latif Yudi dan Ibrahim Idi Subandy, Bahasa dan Kekuasaan. Bandung, Mizan.
- Siahaan, Hotman, dkk. 1985. "Pengaruh Keanekaragaman Struktur Kehidupan Masyarakat Tepian Kota Terhadap Derajat Urbanisasi", Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, *Surya* 5 Januari 1996. "Sebelum Depnaker Mengimbau Instansi lain Latief Pangkas 16 Pungutan". *Surabaya Post*, 5 Oktober 1995. "Ratusan Perusahaan Masih Melanggar UMR".
- Wallace Ruth, A. 1980. *Contemporary Sociological Theory*. Printece Hall Inc, Engle Word Clifts. Wolf, Diane I. 1996. *Javanese Factory Daughters*. London, Duke University Press Durham. Williams, Raymond. 1983. *Keywords a Vocabulary of Culture and Society*. London, Fontana Papeback